



LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

PERIODE SURVEI TRIWULAN I TAHUN 2024

*Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017*

**PENGADILAN NEGERI SERUI
KELAS II
2024**



LEMBAR PENGESAHAN

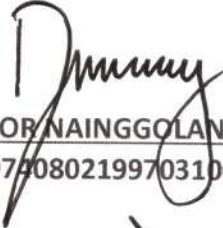
LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

DI PENGADILAN NEGERI SERUI

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

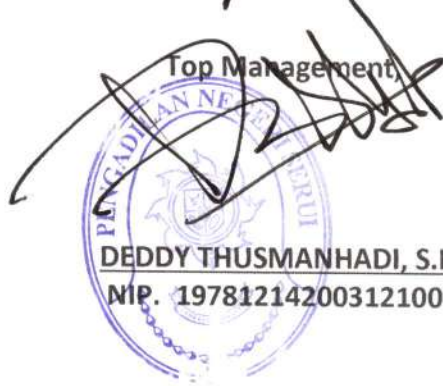
Disahkan di Serui,
4 April 2024

Ketua Tim Survei,



DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.
NIP. 197408021997031002

Top Management,



DEDDY THUSMANHADI, S.H.
NIP. 197812142003121001

ANGGOTA TIM SURVEY :
PHILIPUS MAY, S.H.
RUSTAM H. HASAN, S.H.
RICKY JULIANUS PARDEDE, S.H.
HELFIEN SOMALAY, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Maksud Dan Tujuan	5
1.3. Landasan Hukum	5
1.4. Rencana Kerja	5
BAB II	7
METODOLOGI	7
2.1. Metode Penelitian	7
2.2. Populasi Dan Sampel	7
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	7
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	8
2.5. Teknik Analisis Data	8
2.6. Tahapan pelaksanaan	9
BAB III	11
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	11
3.1. Profil responden	11
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	14
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	22
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	23
BAB IV	24
PENUTUP	24
4.1. Kesimpulan	24
4.2. Rekomendasi	24
4.3. Saran	24

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme/KKN.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dengan cara mengisi kuesioner pada aplikasi survey SISUPER pada laman <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Jumlah responden terkumpul sebanyak 34 orang dengan cara mengisi kuesioner pada aplikasi survey SISUPER.

Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu di sekitar Kantor Pengadilan Negeri Serui.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan dengan data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

PROFIL RESPONDEN

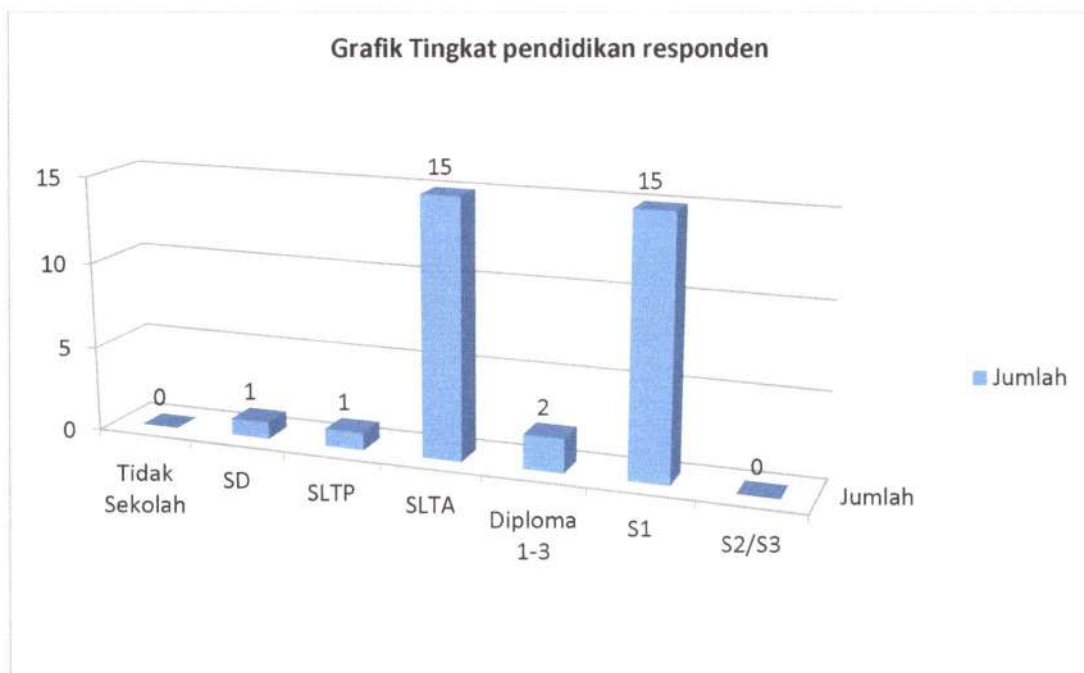
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Serui mayoritas memiliki latar pendidikan S1 sejumlah 15 orang (44,11%) dan pendidikan SLTA sejumlah 15 orang (44,11%).

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1.	Tidak Sekolah	0	0
2.	SD	1	2,94
3.	SLTP	1	2,94
4.	SLTA	15	44,11
5.	Diploma 1-3	2	5,88
6.	S1	15	44,11
7.	S2/S3	0	0
Jumlah		34	100%



3.1.2. Pekerjaan responden

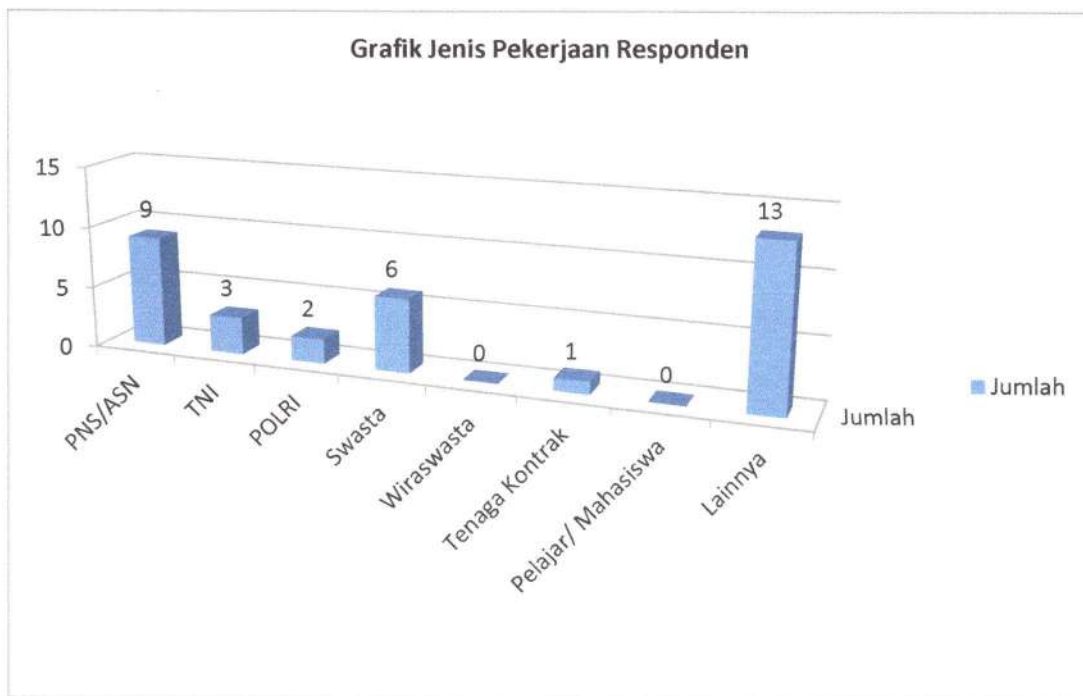
Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Negeri Serui sebagian besar memiliki jenis pekerjaan Lainnya dengan jumlah 13 orang (38,23%).

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan Utama	Jumlah	%
1.	PNS/ASN	9	26,47
2.	TNI	3	8,82
3.	POLRI	2	5,88
4.	Swasta	6	17,64
5.	Wiraswasta	0	0
6.	Tenaga Kontrak	1	2,94
7.	Pelajar/ Mahasiswa	0	0
8.	Lainnya	13	38,23
Jumlah		34	100%

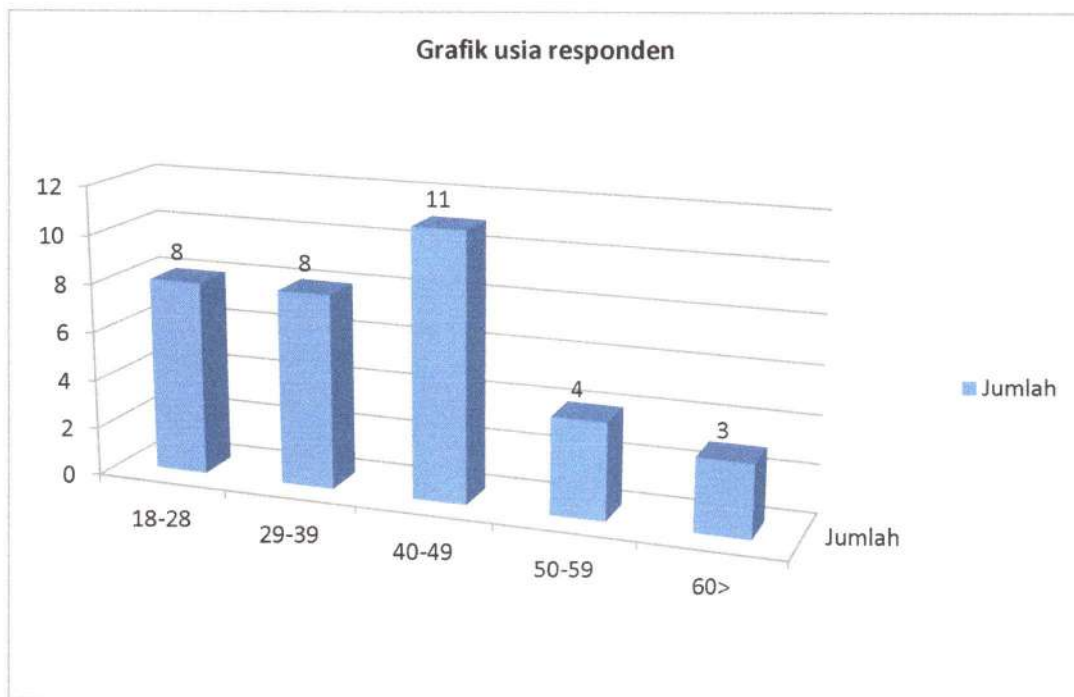


3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Serui berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia 40-49 tahun dengan jumlah 11 orang (32,35%).

Tabel 7.
Usia responden

No.	Usia (Tahun)	Jumlah	%
1.	18-28	8	23,53
2.	29-39	8	23,53
3.	40-49	11	32,35
4.	50-59	4	11,76
4.	60>	3	8,82
Jumlah		34	100%

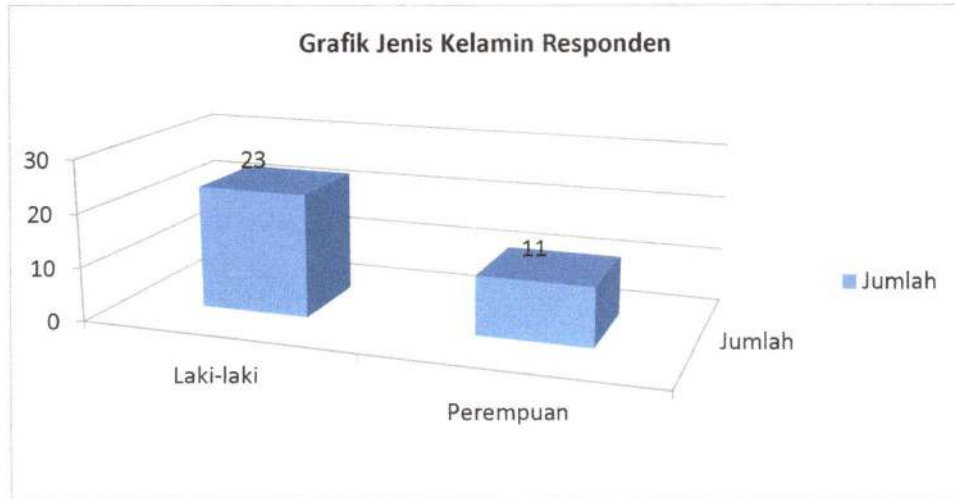


3.1.4. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden yang dominan menggunakan layanan di PN Serui adalah Laki-laki dengan jumlah 23 orang (67.64%).

Tabel 8.
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki-laki	23	78.12
2.	Perempuan	11	21.87
Jumlah		34	100%



INDEKS PERSEPSI KORUPSI PER INDIKATOR

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

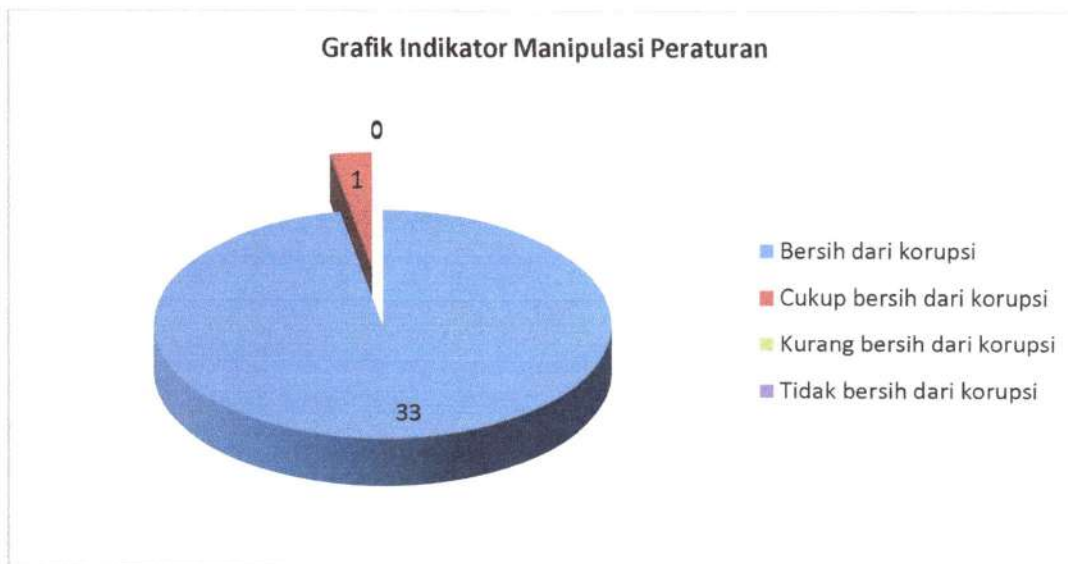
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.97.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Serui masuk kategori **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 9.

Frekuensi pada indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari korupsi	4	33	97,05
2.	Cukup bersih dari korupsi	3	1	2,94
3.	Kurang bersih dari korupsi	2	0	0
4.	Tidak bersih dari korupsi	1	0	0
Jumlah			34	100



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

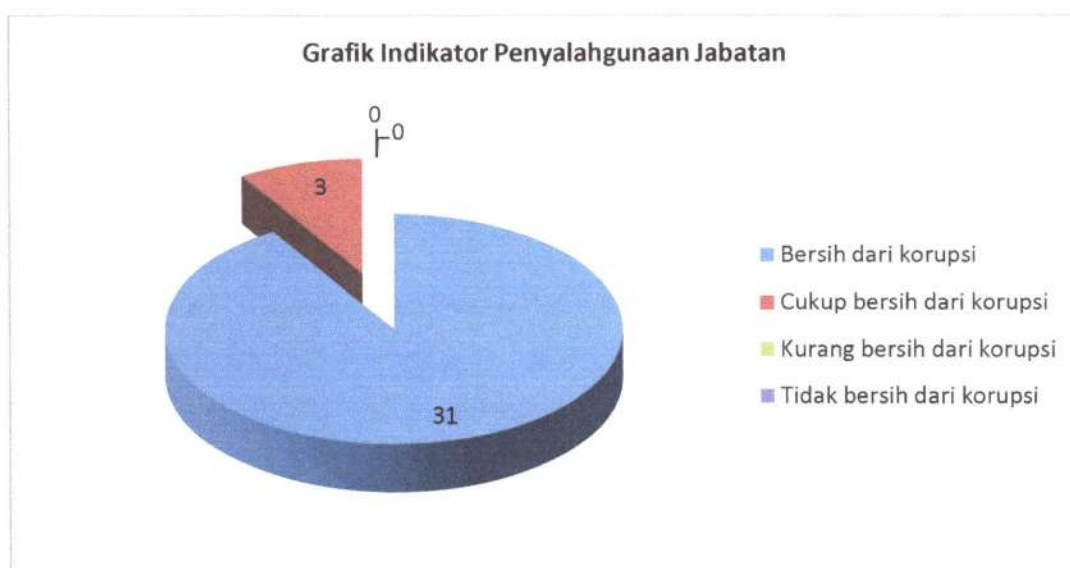
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serui pada indikator Penyalahgunaan Jabatan masuk kategori **Bersih Dari Korupsi**.

Tabel 10.

Frekuensi pada indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari korupsi	4	31	91,17
2.	Cukup bersih dari korupsi	3	3	8,82
3.	Kurang bersih dari korupsi	2	0	0
4.	Tidak bersih dari korupsi	1	0	0
Jumlah			34	100



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

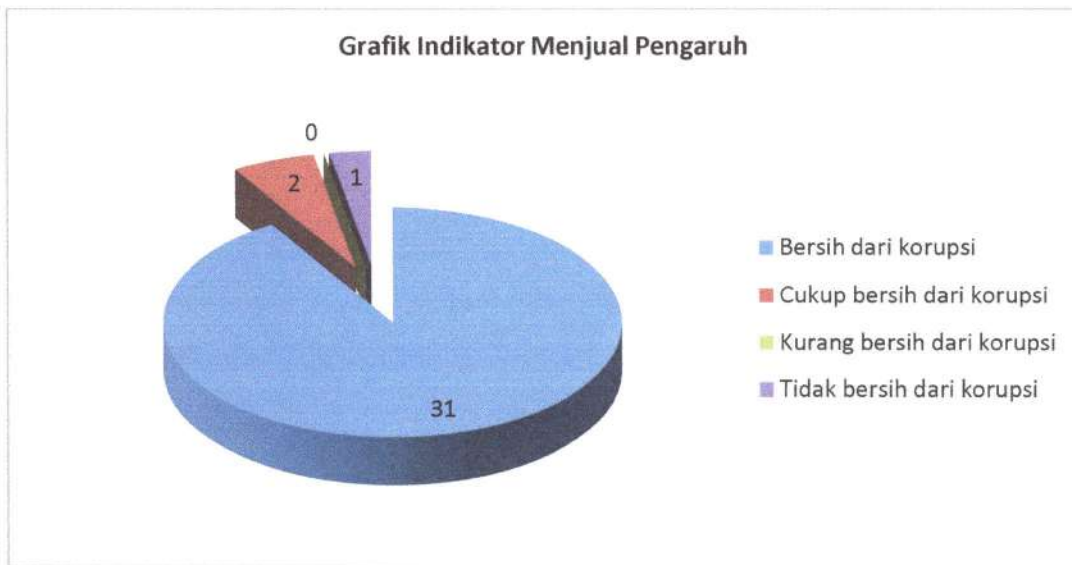
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,85.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Pengadilan Negeri Serui Kerja pada Indikator Menjual Pengaruh masuk kategori **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 11.

Frekuensi pada indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari korupsi	4	31	91,17
2.	Cukup bersih dari korupsi	3	2	5,88
3.	Kurang bersih dari korupsi	2	0	0
4.	Tidak bersih dari korupsi	1	1	2,94
Jumlah			34	100



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

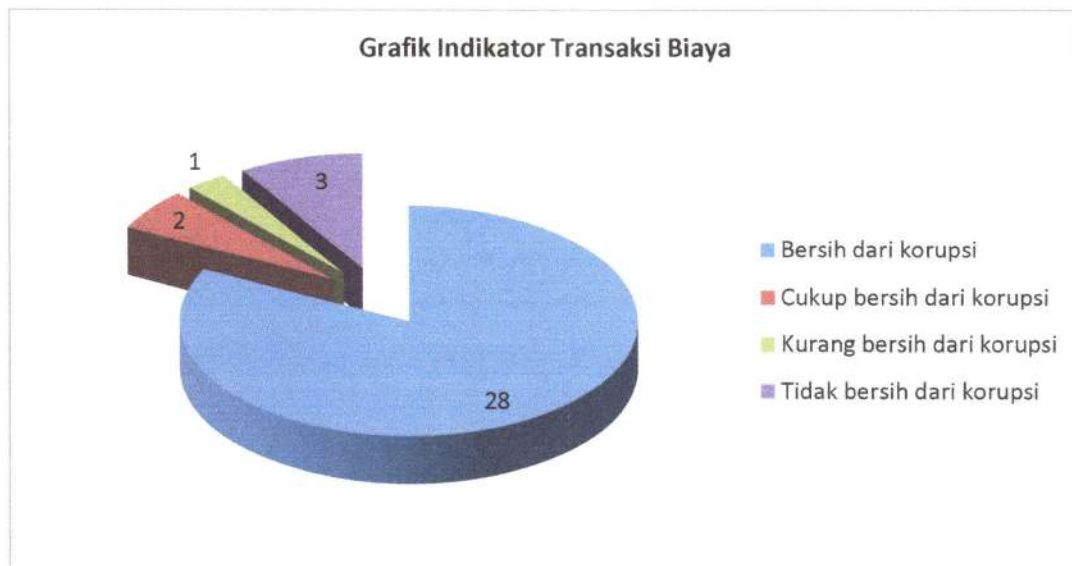
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,61.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serui pada indikator Transaksi Biaya masuk kategori **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 12.

Frekuensi pada indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari korupsi	4	28	82,35
2.	Cukup bersih dari korupsi	3	2	5,88
3.	Kurang bersih dari korupsi	2	1	2,94
4.	Tidak bersih dari korupsi	1	3	8,82
Jumlah			34	100



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

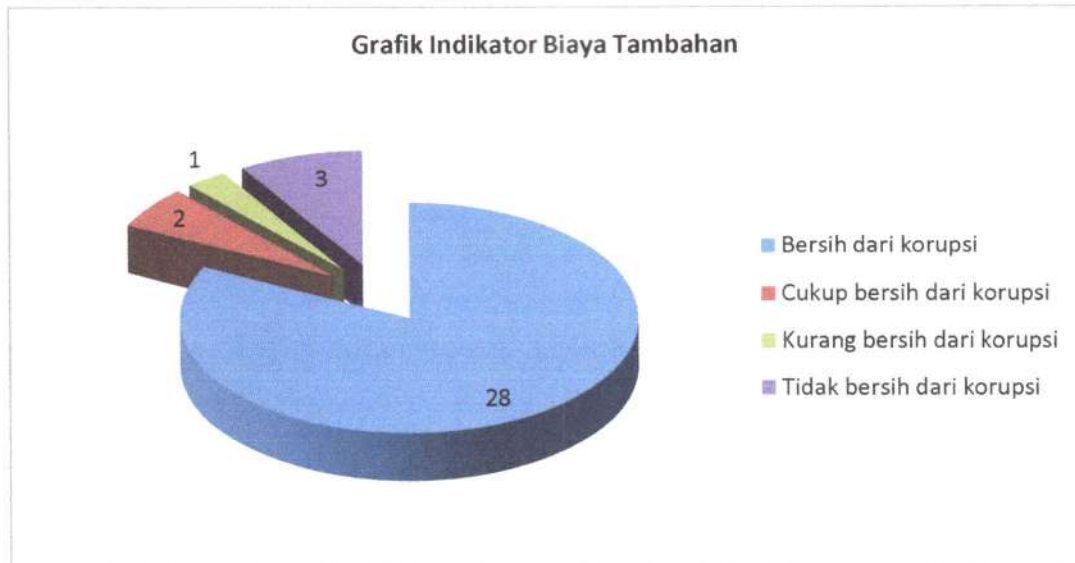
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,61.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serui pada indikator Biaya Tambahan masuk kategori **kurang bersih dari Korupsi**

Tabel 13.

Frekuensi pada indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari korupsi	4	28	82,35
2.	Cukup bersih dari korupsi	3	2	5,88
3.	Kurang bersih dari korupsi	2	3	2,94
4.	Tidak bersih dari korupsi	1	1	8,82
Jumlah			34	100



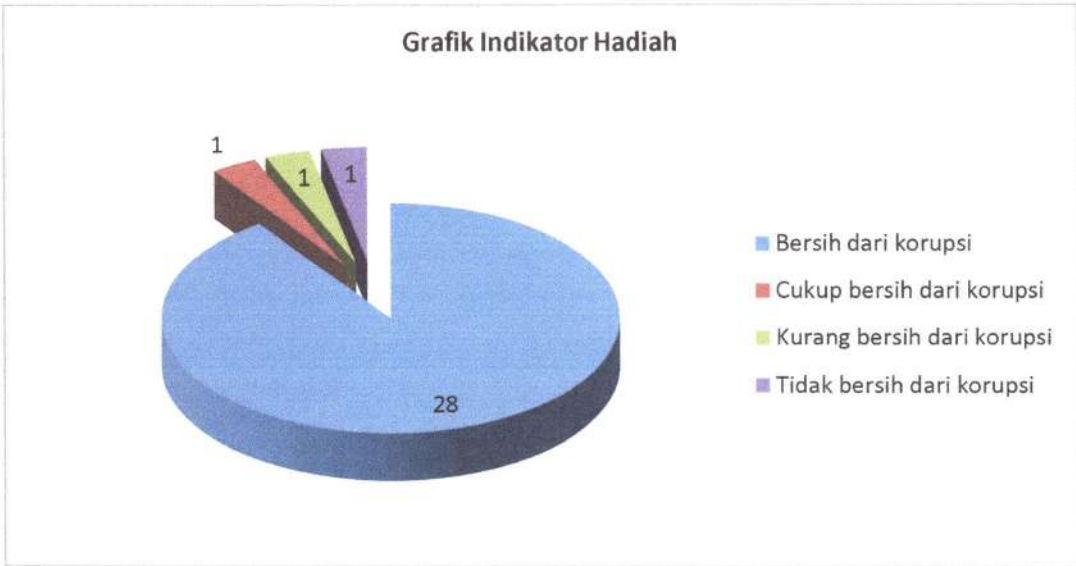
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,73.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serui pada indikator Hadiah masuk kategori **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 14.
Frekuensi pada indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari korupsi	4	28	82,35
2.	Cukup bersih dari korupsi	3	4	11,76
3.	Kurang bersih dari korupsi	2	1	2,94
4.	Tidak bersih dari korupsi	1	1	2,94
Jumlah			34	100



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

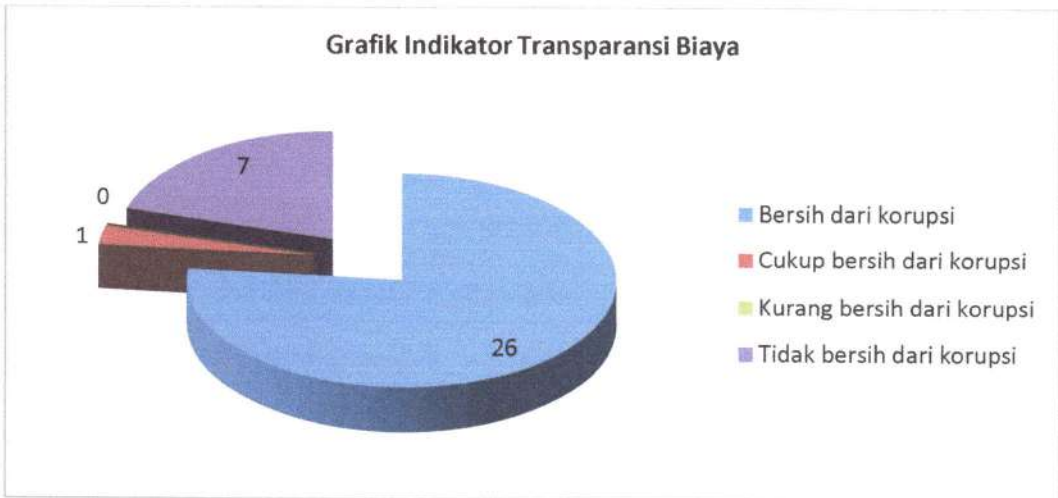
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,35.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serui pada indikator Transparansi Biaya masuk kategori **kurang Bersih dari Korupsi**.

Tabel 15.

Frekuensi pada indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari korupsi	4	26	76,47
2.	Cukup bersih dari korupsi	3	1	2,94
3.	Kurang bersih dari korupsi	2	0	0
4.	Tidak bersih dari korupsi	1	7	20,58
Jumlah			34	100



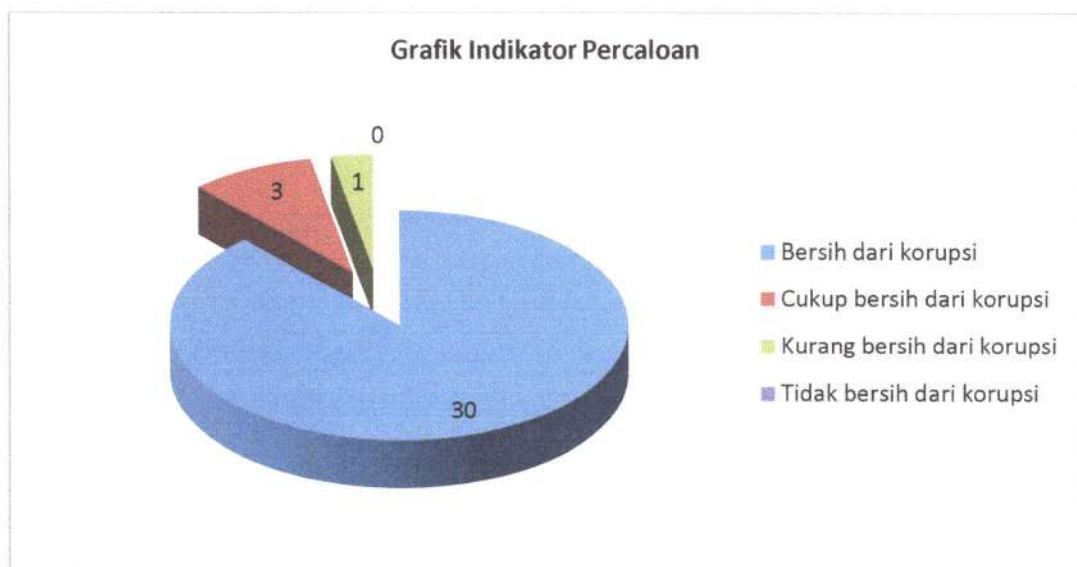
3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.85. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serui pada indikator Percaloan masuk kategori **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 16.

Frekuensi pada indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari korupsi	4	30	88,23
2.	Cukup bersih dari korupsi	3	3	8,82
3.	Kurang bersih dari korupsi	2	1	2,94
4.	Tidak bersih dari korupsi	1	0	0
Jumlah			34	100



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

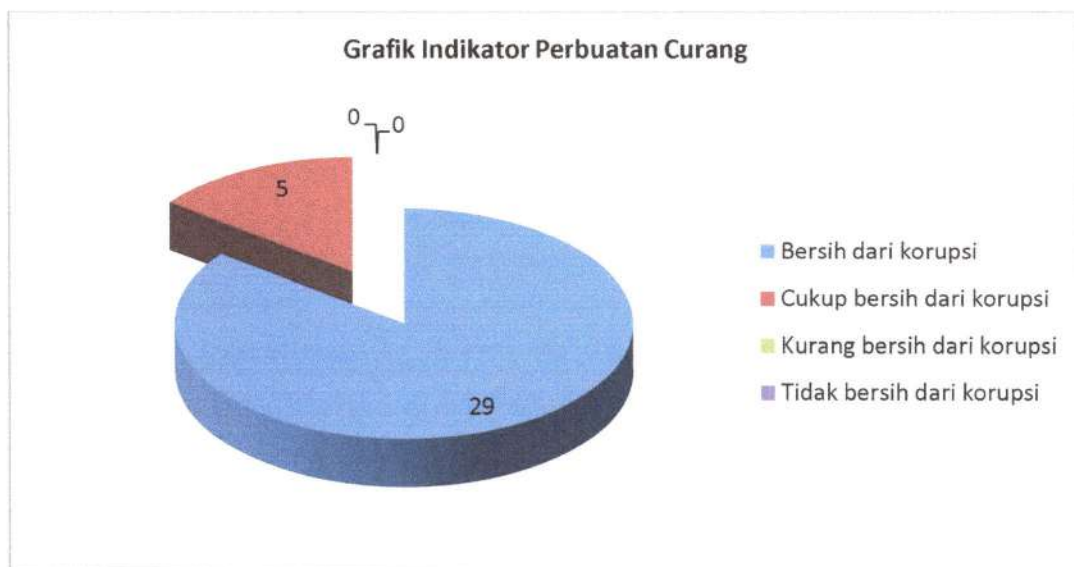
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,85.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serui pada indikator Perbuatan Curang masuk kategori **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 17.

Frekuensi pada indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari korupsi	4	29	85,29
2.	Cukup bersih dari korupsi	3	5	14,70
3.	Kurang bersih dari korupsi	2	0	0
4.	Tidak bersih dari korupsi	1	0	0
Jumlah			34	100



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

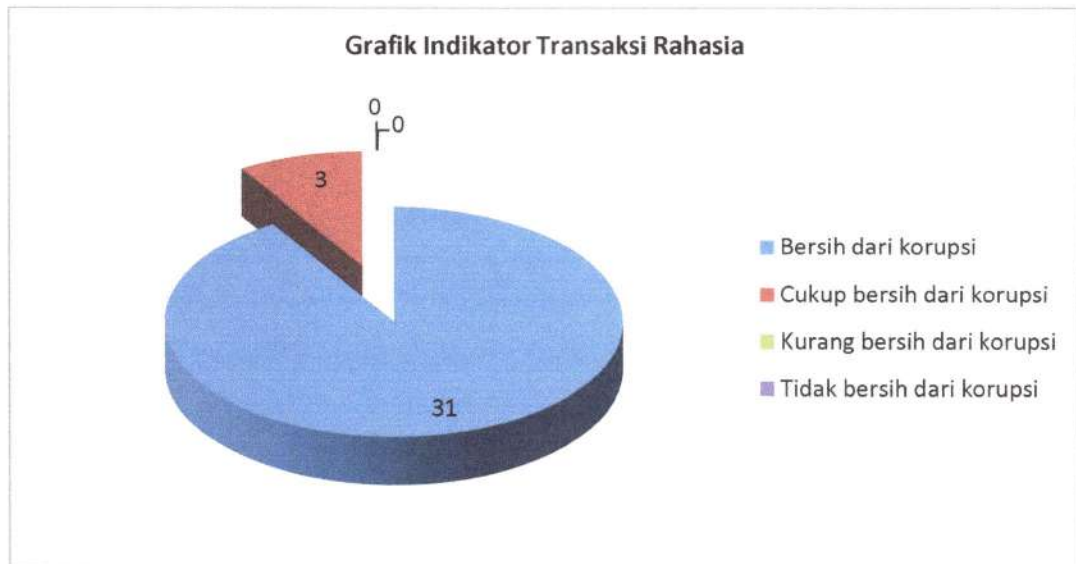
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,91.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serui pada indikator Transaksi Rahasia masuk kategori **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 18.

Frekuensi pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari korupsi	4	31	91,17
2.	Cukup bersih dari korupsi	3	3	8,82
3.	Kurang bersih dari korupsi	2	0	0
4.	Tidak bersih dari korupsi	1	0	0
Jumlah			34	100



Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serui sebesar **3,77** masuk dalam kategori penilaian **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 19.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

No	Indikator	Nilai
1.	Manipulasi Peraturan	3,97
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,91
3.	Menjual Pengaruh	3,85
4.	Transaksi Biaya	3,61
5.	Biaya Tambahan	3,61
6.	Hadiah	3,73
7.	Transparansi Biaya	3,35
8.	Percaloan	3,85
9.	Perbuatan Curang	3,85
10.	Transaksi Rahasia	3,91
Rata-rata keseluruhan		3,77

Indeks **37,67** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **3,26 – 4,00** dan setelah dikonversi ke dalam nilai interval konversi diperoleh nilai IPK **94,19** masuk dalam nilai

konversi IPK pada angka **81,26-100,00**.

Tabel 20.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Serui

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Serui.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Serui

No.	Masukan/Saran
1.	

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serui diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Serui memiliki Indeks Persepsi Korupsi sebesar **3,77** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**

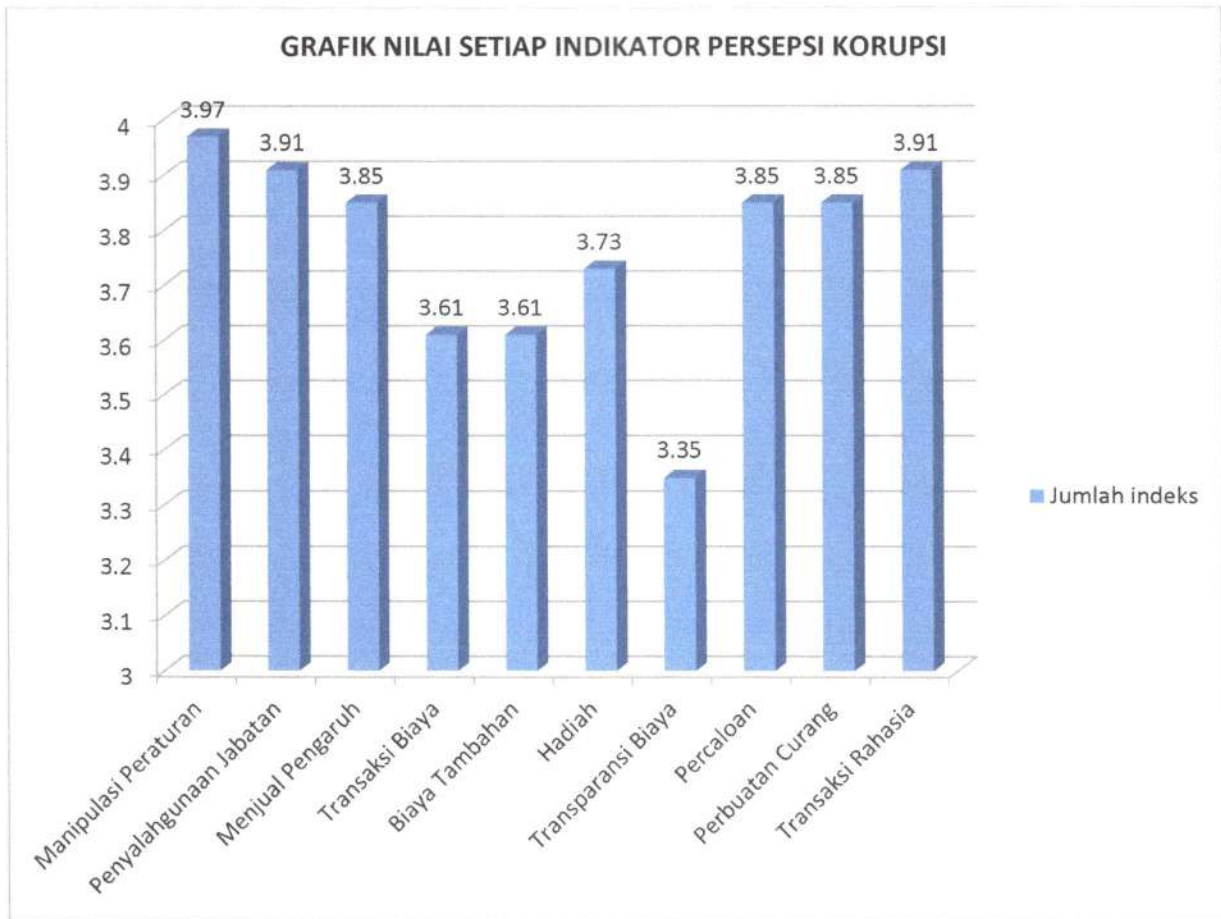
Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,97.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,91.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,85.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,61.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,61.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,73.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,35.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,85.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,85.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,91.

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Serui Triwulan I Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3** atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transparansi Biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya dengan indeks 3,35.

Sebagai visualisasi dapat dilihat pada grafik nilai indeks keseluruhan indikator berikut :




4.3. Saran

Dengan nilai yang terendah berada pada indikator Transparansi Biaya yakni nilai indeks 3,35 maka perlu adanya tindak lanjut sebagai tindakan perbaikan dari Team Management Pengadilan Negeri Serui yaitu memberikan pengarahan kepada seluruh aparatur PN Serui yang berhubungan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar selalu transparan mengenai biaya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan serta menghindari perilaku penyimpangan/kecurangan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tangkapan gambar Kuisioner elektronik pada aplikasi SISUPER pada laman ("<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/400069>")

← ↻ ⚠ Not secure | esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id | Pengadilan: 400069

 APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

✓ Data Responden
Nama: ceta.pd@pkp.go.id

✓ Layanan
Layanan

4. Form Kuisioner
Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

✓ Kesan & pesan
MPLP01 - KANTOR PENGADILAN ANTI

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
Tidak Sesuai Prosedur
Jarang Sesuai Prosedur
Sering Sesuai Prosedur
Selalu Sesuai Prosedur

2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dan petugas untuk meminta imbalan tertentu?
Petugas melayani selalu meminta imbalan
Petugas melayani sering meminta imbalan
Petugas melayani jarang meminta imbalan
Petugas melayani tanpa meminta imbalan

3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang / karyawan Pengadilan / yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif biaya baik melalui web atau petugas layanan di Pengadilan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu

5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu

6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan / meski pun tidak diminta?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu

8. Apakah pernah mengetahui ada praktik percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik kkk di Pengadilan?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan di luar peradilan?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

PENGELOLAAN DATA INDEKS PERSEPSI KORUPSI

TRIWULAN I TAHUN 2024

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Serui

Alamat : Jl. Sumatera Serui

No. Responden	NILAI UNSUR PERTANYAAN									
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
6	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
7	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4
8	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
9	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4
17	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4
18	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4
19	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4
20	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4
21	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4
22	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
25	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	1	4	4	4	4	3	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah	135	133	131	123	123	127	114	131	131	133
NRR	3,971	3,912	3,853	3,618	3,618	3,735	3,353	3,853	3,853	3,912
NRR tertimbang	0,397	0,391	0,385	0,362	0,362	0,374	0,335	0,385	0,385	0,391

Nilai indeks :	3,77
Nilai IPK :	94.19

Kategori Interval Nilai IPK 94.19 : Bersih dari korupsi (81,26 - 100,00)

Keterangan:

Q1-Q10	: Unsur-Unsur Pertanyaan/ Ruang Lingkup
NRR	: Nilai Rata-rata
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
*)	: Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per Unsur	: Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang Per Unsur	: NRR per unsur x 0.1
Nilai Penimbang	: Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1/10= 0.1

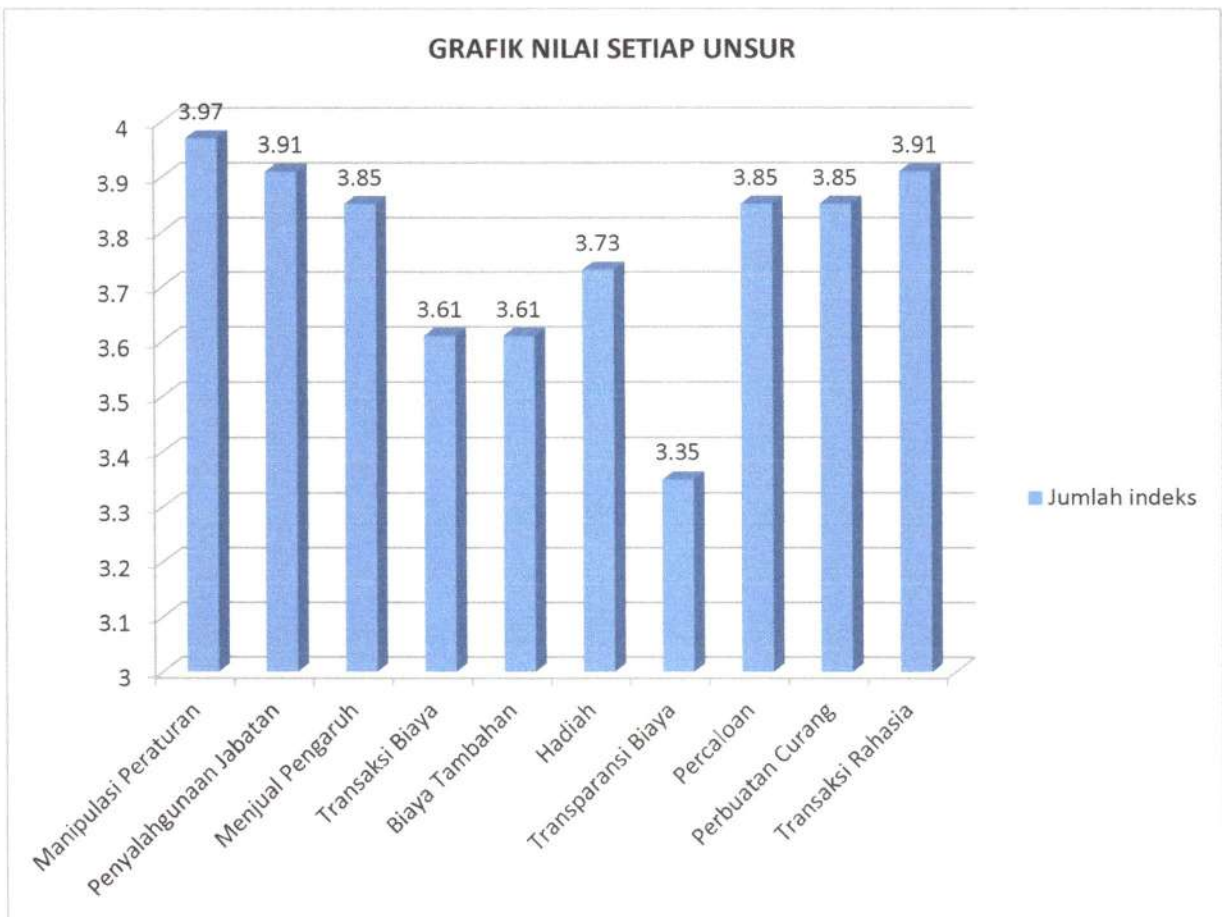
Interval Nilai Persepsi Korupsi:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Nilai Unsur Pertanyaan:

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	3,97
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3,91
Q 3	Menjual Pengaruh	3,85
Q 4	Transaksi Biaya	3,61
Q 5	Biaya Tambahan	3,61
Q 6	Hadiah	3,73
Q 7	Transparansi Biaya	3,35
Q 8	Percaloan	3,85
Q 9	Perbuatan Curang	3,85
Q 10	Transaksi Rahasia	3,91
Rata-rata keseluruhan		3,77

Grafik nilai setiap unsur:



DOKUMENTASI

(Gambar: tangkapan layar publikasi IPK pada aplikasi SISUPER)

